



# **Kapita Selekta Hukum Tata Negara**

**Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.**

**Universitas 17 Agustus  
Jakarta**



Kata Pengantar

# Kapita Selekta Hukum Tata Negara

**Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.**

**Universitas 17 Agustus  
Jakarta**



## **Kapita Selekta Hukum Tata Negara**

Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.

Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus  
Jakarta

ISBN 978-979-95820-2-4

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan  
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desain kulit muka dan tata letak  
ATA Prints

Dicetak digital oleh ATA Prints  
Isi di luar tanggung jawab percetakan

ISBN 9



## Kata Pengantar

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hikmat, kesehatan dan tenaga kepada penulis sehingga buku *Kapita Selekta Hukum Tata Negara* ini dapat selesai. Penulis menyadari tanpa kemurahan Tuhan tidak mungkin buku ini dapat tersaji di hadapan pembaca sekalian yang terhormat.

Buku ini sesuai dengan hakikatnya sebagai kapita selekta menyajikan bahan-bahan yang terseleksi dari materi Hukum Tata Negara dan tidak mengajikan pembahasan suatu topik tertentu yang komprehensif. Namun, penulis tetap merangkum segenap materi buku ini dalam suatu jalan pikiran yang sistematis.

Pembahasan akan dimulai dari proklamasi kemerdekaan dengan jiwa dan semangat serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dari nilai-nilai itu akan dihasilkan asas-asas hukum tata negara seperti asas demokrasi, negara hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam bentuk yang positif, asas-asas hukum tata negara itu tercantum dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai norma-norma yang mengatur organisasi negara Republik Indonesia.

Salah satu aspek yang diatur dalam UUD 1945 adalah masalah lembaga-lembaga negara dan salah satu lembaga negara yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut pandangan banyak pihak kedudukan dan fungsi DPD sebagai lembaga perwakilan masih belum maksimal. Kelemahan DPD sebagai lembaga perwakilan meliputi berbagai aspek seperti penulis sajikan dalam topik tentang Dewan Perwakilan Daerah.

Buku ini merupakan kumpulan dari beberapa tulisan penulis yang beberapa di antaranya sudah diterbitkan baik dalam jurnal-jurnal ilmiah maupun dalam bentuk buku. Oleh sebab itu, ada bagian dari materi buku ini yang merupakan hasil revisi atas tulisan penulis yang sudah diterbitkan tersebut. Semoga hal itu tidak mengganggu pembaca yang budiman.

Buku ini merupakan buku kedua penulis yang dapat terbit dalam waktu singkat berkat dorongan dari berbagai pihak. Untuk penulis layak mengucapkan terima kasih kepada para pihak tersebut yaitu antara lain Prof. Dr. Hendra Tanuatmadja, S.H., L. L. M. (Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta), Bpk. Djokopitojo, S.H. (Pudek I Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta), Bpk. Budiyanto, S.H., M.H. (Pudek II Fakultas Hukum Untag Jakarta), Bpk. Gazalba Saleh, S.H., M.H. (Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untag Jakarta), Bpk. Asep Bambang Hermanto S.H. M.H., Ibu Retno Kusumaningsih S.H., M.H. dan segenap kolega di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan yang tidak putus-putusnya dari segenap keluarga dan secara khusus dari istri Ibu Yuniar br. Sianipar, S.H. dan kedua anak-anak penulis yaitu Jeremia Tumpal Sibuea dan Yemima Febriani Sibuea. Buku ini tidak mungkin terbit tanpa dukungan mereka.

Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dan terutama kepada penerbit yang memberi dukungan yang tidak ternilai kepada penulis. Sebagai kata penutup penulis mengucapkan terima kasih atas segenap tegur sapa dari para pembaca. Terima kasih dan selamat membaca.

Jakarta, Juli 2007

Penulis



# Daftar Isi

Kata Pengantar

iii

Daftar Isi

v

## Bab 1 Proklamasi Kemerdekaan Sebagai Asas Hukum Tertinggi Bagi Sistem Hukum Nasional (Indonesia) 1

Makna Proklamasi Kemerdekaan 1

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan Staatsidee Negara Republik Indonesia 11

Cita Hukum (*Rechtsidee*) Bagian dari Cita Negara (*Staatsidee*) Bangsa Indonesia 16

Kepustakaan 20

## Bab 2 Demokrasi Sebagai Salah Satu Asas Hukum Tata Negara 22

Sejarah Singkat Perkembangan Demokrasi 20

Pengertian dan Hakikat Demokrasi serta Unsur-unsur Demokrasi 29

Kepustakaan 38

## Bab 3 Negara Hukum Sebagai Suatu Konsepsi atau Doktrin atau Asas dalam Hukum Tata Negara 42

Sejarah Perkembangan Negara Hukum 42

Pengertian dan Hakikat Negara Hukum 54

Kepustakaan 61

## Bab 4 Konstitusi atau Undang-undang Dasar 64

Istilah dan Sejarah Singkat Konstitusi 64

Materi Muatan Konstitusi dan Fungsi Konstitusi 72

Fungsi Hukum pada Umumnya dan Fungsi Konstitusi 77

Kepustakaan 84

Daftar Isi v

**Bab 5 Kelemahan-Kelemahan Dewan Perwakilan Daerah  
Sebagai Lembaga Perwakilan dalam Struktur  
Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia 87**

Perkembangan Masyarakat dan Perubahan Konstitusi 8

Gerakan Reformasi dan Amandemen UUD 1945 92

Beberapa Kelemahan DPD Sebagai Lembaga Perwakilan 97

Susunan Keanggotaan DPD dan Hubungannya dengan  
Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden 116

Kepustakaan 117

**Bab 6 Sifat Hakikat Kekuasaan Judisial Sebagai Cabang  
Kekuasaan Negara yang Merdeka 122**

Asas Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kekuasaan Negara  
yang Merdeka 122

Batas-batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman 129

Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Kemerdekaan  
Kekuasaan Kehakiman 132

Kepustakaan 134

**Bab 7 Perubahan Struktur Ketatanegaraan dan Kekuasaan  
Kehakiman Pascaamandemen Undang-undang Dasar  
1945 136**

Reformasi dan Perubahan Struktur Ketatanegaraan 136

Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Keseimbang-  
an dengan Cabang-Cabang Kekuasaan Negara Setelah  
Amandemen Ketiga UUD 1945 143

Kedudukan Mahkamah Agung dan Badan-badan Pera-  
dilan Menurut UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 4  
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 148

Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Menu-  
rut UUD 1945 Amandemen Ketiga dan UU Nomor 24  
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 152

Kepustakaan 154

**Daftar Pustaka 156**





### **Hotma Pardomuan Sibuea**

Hotma Pardomuan Sibuea. Lahir di Sibolga, Sumatera Utara, 23 Maret 1958. Pendidikan SD sampai dengan SMU diselesaikan di Sumatera Utara. Alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tahun 1985 dan menyelesaikan program magister hukum pada program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun

2001, Bidang Kajian Utama Hukum Tata Negara. Sejak tahun 2004 menempuh program doktor Ilmu Hukum pada Universitas Pelita Harapan Jakarta dan sekarang sedang menulis disertasi tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di bawah bimbingan Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. (promotor) dan Prof. Sr. Satya Arinanto, S.H. M.H. (ko-promotor).

Jabatan-jabatan struktural yang pernah dijabat adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (Tahun 2002-2005), Pudek I dan Pudek III Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Sebagai dosen sudah mengajar sejak tahun 1986 selama kurang lebih 21 tahun sampai dengan sekarang. Jabatan akademik terakhir adalah LEKTOR KEPALA. Sekarang merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Selain itu, menjadi dosen tidak tetap (luar biasa) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta dan pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dan beberapa fakultas hukum swasta lainnya.

Beberapa mata kuliah yang diasuh dan pernah diasuh antara lain adalah Pegantar Ilmu Hukum, Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Kekuasaan Kehakiman, Metode Penelitian Hukum, Politik Hukum dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah.

Buku yang sudah diterbitkan adalah "Kekuasaan Kehakiman Indonesia" (Jakarta, Juni 2007) dan beberapa kali melakukan penelitian dan pengkajian hukum dengan instansi pemerintah seperti Pemerintah DKI Jakarta dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Selain itu menulis di jurnal-jurnal ilmiah fakultas hukum swasta dan sering melakukan penelitian mandiri.